



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 116/VII/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 116/VII/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

1. Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang Kota Serang
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Tb. Tisna Adi Firsia
Alamat : Bumi Agung Permai Blok. R1 No. 10 RT.002 RW.018 Kel. Unyur
Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech
Nawawi Al- Bantani, Curug Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Juli 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 25 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 116/VII/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Mei 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui surat nomor: 18 Perihal Permohonan Informasi, dan diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta adalah salinan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun 2016 dan 2017.

[2.3] Pada tanggal 29 Mei 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor: 18A, dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 21 Juli 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 25 Juli 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 464/X/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 465/X/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Termohon tertanggal 19 Oktober 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Oktober 2017, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Awal Pasenggong, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tertanggal 23 Oktober 2017, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak kembali untuk hadir pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 473/X/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB, sedangkan Termohon telah diberitahukan pada saat persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Oktober 2017, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Awal Pasenggong, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tertanggal 23 Oktober 2017, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 116/VII/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa dihadiri Pemohon.



Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Rohimah)



Panitera Pengganti

(Hujaji)